

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
POTENSI PARIWISATA TELUK KILUAN KECAMATAN  
KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial ( S. Sos )  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

**ENGGA SATRUKO  
NPM: 1231040121**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/ 2019 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI  
PARIWISATA TELUK KILUAN KECAMATAN KELUMBAYAN  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Pembimbing I : Drs. Effendi, M.Hum

Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.IP

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh**

**Engga Satruko  
NPM.1231040121**

**Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA TELUK KILUAN KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh

**ENGGA SATRUKO**

Teluk Kiluan memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata untuk masa yang akan datang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai sektor unggulan daerah, selain untuk menjaga potensi dan mensejahterakan masyarakat juga untuk menambah pendapatan daerah dalam peningkatan jumlah PAD. Melihat potensi pariwisata tersebut, maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk mengembangkan pariwisata yang berpedoman kepada (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Sehingga kedepannya pariwisata yang akan datang lebih baik lagi untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara dan mengatasi segala masalah yang ada seperti masalah sosialisasi, akses, pengadaan fasilitas dan kerjasama antar pemerintah yang terkait.

Penelitian ini mengkaji pada permasalahan pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola pariwisata di Teluk Kiluan. Maka, Tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkap permasalahan peran Pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Penelitian ini adalah penelitian (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode yang dipakai yaitu metode observasi, interview, dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Tanggamus memiliki kekayaan wisata alam yang dapat di kelola dengan melibatkan segenap elemen masyarakat, sehingga pemerintah daerah memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan, Pariwisata, Teluk Kiluan





**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Endro Suratman Sukarame 1 Tlp. (0721)703260 Fax. 703260 Bandar Lampung (35142)

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan  
Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan  
Kelumbayan kabupaten Tanggamus**

Nama Mahasiswa : **ENGGA SATRUKO**

NPM : **1231040121**

Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**

Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I**

  
**Drs. Efendi, M.Hum.**  
**NIP.195807211986031004**

**Pembimbing II**

  
**Drs. Agustamsyah, M.IP**  
**Nip. 1975060520003102**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

  
**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**  
**NIP. 197801302011012004**





**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Endro Suratman Sukarame 1 Tlp. (0721)703260 Fax. 703260 Bandar Lampung (35142)*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan  
Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan  
Kelumbayan kabupaten Tanggamus**

**Nama : ENGGA SATRUKO**

**NPM : 1231040121**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
pada hari / tanggal: Senin / 23 Desember 2019**

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**

**Sekretaris : Gesit Yudha Puji Arsono, S.Fil.I., M.I.P**

**Penguji Utama : Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A**

**Penguji Pendamping I : Dr Drs. Effendi, M.Hum**

**Penguji Pendamping II: Drs. Agustamsyah, M.IP**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. H. Aji Anshori, M. Ag.**

**NIP. 196003232989031004**

## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Q.S Al-Mulk: 15)<sup>1</sup>”*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Toha Putra, 2008)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku yang tercinta dan tersayang. Ayahanda Hanapi dan Ibunda Tasiah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak kakakku Ratna Marawati dan Rona Juliatif yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat dan motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Para dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.

## RIWAYAT HIDUP

Engga Satruko dilahirkan di desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus pada tanggal 19 Agustus 1994. Peneliti adalah anak ke 3 dari 3 saudara. Terlahir dari pasangan buah cinta dan kasih sayang pasangan ayahanda Hanapi dan ibunda Tasiah.

Pendidikan dimulai dari SDN Tanjung Begelung dan selesai pada tahun 2006. SMP Negeri 2 Sumberejo, selesai pada tahun 2009. SMA Islam Kebumen Kec. Sumberejo, selesai pada tahun 2012. Ketiga dijalani dan dislesaikan dengan lancar. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I TA. 2012/2017.

Pada tahun 2006/2012 aktif di Ekstrakurikuler Pramuka. Tahun 2013 peneliti bergabung dan aktif dalam organisasi ekstra kampus yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota aktif.

Bandar Lampung, 23 Desember 2019

Peneliti

**Engga Satruko**  
NPM.1231040121



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, penggenggam diri bagi seluruh ciptaan-Nya dengan kasih sayang-Nya yang telah memberikan Hidayah, Taufik dan Rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Tokoh Politik Dunia, pemimpin Umat, Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu al-Qur’an dan Hadits. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih, kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag**, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung ini.
2. Bapak **Dr. H. Afif Anshori, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
3. Bapak **Drs. Effendi, M. Hum.** selaku pembimbing I dan Bapak **Drs. Agustamsyah, M.IP.** selaku pembimbing II, yang dengan sepenuh hati serta susah payah telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si** selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu **Eska Prawisudawati Ulpa, M. Si** selaku Sekertaris jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu dan motivai peneliti dalam menyelesaikan studi di fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala staf Perpustakaan Ushuluddin dan Studi Agama, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, beserta staf karyawan atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang telah dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2012 baik dari jurusan PPI, TH, AF, PA dan adik-adik tingkat di semua jurusan yang slalu mendo'akan, memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa dilupakan.

Semoga amal dan jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan dicatat Allah Swt., sebagai amal shalih dan memperoleh Ridha-Nya., dan semoga skripsi ini dapat bermanfa'at dan menjadi amal shalih. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 23 Desember 2019

**Engga Satruko**

**NPM.1231040121**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	10
2. Metode Pengumpulan Data .....	11
3. Metode Analisis Data .....	13



G. Tinjauan Pustaka .....	14
<b>BAB II. PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN PARIWISATA</b>	
.....	<b>16</b>
A. Pemerintah Daerah .....	16
1. Tugas Pemerintah Daerah.....	17
2. Fungsi Pemerintah Daerah.....	18
B. Pengelolaan Pariwisata .....	19
1. Pengeolaan.....	19
2. Pariwisata.....	20
C. Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah.....	23
1. Faktor Penunjang Pemerintah Daerah .....	23
a. Ketersediaan Anggaran.....	23
b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana .....	25
c. Kemitraan .....	26
d. Landasan Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Pariwisata.....	26
2. Daerah Tujuan Wisata .....	28
3. Prasarana Wisata.....	29
4. Masyarakat dan Lingkungan .....	30
a. Masyarakat.....	31
b. Lingkungan.....	32
c. Budaya .....	33
D. Berbagai model pengelolaan Pariwiata oleh Pemerintah Daerah .....	33
1. Pemerintah Daerah Tanggamus.....	33

2. Pemerintah Daerah Lampung Barat .....	35
3. Pemerintah Daerah Tangerang .....	36

### **BAB III. PEMERINTAH DAERAH DAN PARIWISATA TELUK**

<b>KILUAN KABUPATEN TANGGAMUS .....</b>	<b>37</b>
A. Kabupaten Tanggamus .....	37
1. Sejarah Kabupaten Tanggamus .....	38
2. Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus .....	39
3. Kondisi Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik .....	40
4. Kondisi Demografi .....	44
B. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus .....	44
1. Visi dan Misi .....	44
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
3. Sumber Daya Manusia.....	45
4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus .....	48
C. Gambaran Umum Pekon Kiluan .....	49
1. Sejarah Singkat Pekon Kiluan .....	49
2. Keadaan Geografis .....	49
3. Keadaan Demografis .....	52
a. Bidang Relegius .....	52
b. BidangEkonomi.....	53
c. Susunan Aparatur Pemerintahan Desa Kiluan .....	54
D. Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Sadar Wisata oleh Pemerintah Daerah .....	55

<b>BAB IV. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN</b>	
<b>POTENSI PARIWISATA TELUK KILUAN KECAMATAN</b>	
<b>KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS .....</b>	<b>58</b>
A. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus .....	58
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus .....	66
1. Faktor-faktor Pendukung Pengelolaan Pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus .....	66
2. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus .....	71
<b>BAB. V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus”*. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah yang penulis maksud yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Peran Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah. Fungsi pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan.<sup>2</sup> Peran pemerintah menurut Ryasas Rasyid ada tiga yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan.<sup>3</sup> Fungsi Pemerintah Daerah meliputi menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, melaksanakan pembangunan daerah secara merata, menyediakan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tentang Pemerintah Daerah BAB 1 Pasal 1 Tahun 2004, h.4.

<sup>2</sup> <http://www.mikirbae.com/kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah.html> (4 oktober 2016).

<sup>3</sup> Taliziduhu Ndaha, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.58.

secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.<sup>4</sup> Pariwisata berasal dari kata wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang didukung dalam jangka waktu sementara.<sup>5</sup>

Judul penelitian ini bermaksud, suatu upaya untuk mengetahui kebijakan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata dengan memberdayakan masyarakat, agar masyarakat mampu mengelola objek wisata dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun hal-hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Penulis tertarik mengangkat Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, karena potensi pariwisata mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat apabila potensi pariwisata ini dikelola secara optimal.
2. Peran Pemerintah sangat penting khususnya dibidang pariwisata, karena pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengaturan, penyedia

---

<sup>4</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.5.

<sup>5</sup> Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media:2013), h.1.

berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata sehingga pariwisata di Teluk Kiluan dapat berjalan dengan optimal.

3. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan Jurusan Pemikiran Politik Islam dan lokasi penelitian dapat dijangkau dengan sarana dan biaya yang tidak berlebihan.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah atau budaya. Berlimpahnya Sumber Daya Alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketika sumber daya tersebut dapat di kelola secara optimal. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat tidak berhasil dalam mengelola suatu sumber daya.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Industri pariwisata telah membuktikan sebagai sebuah alternatif kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bambang Sunaryo, disamping manfaat ekonomi secara nasional dan perspektif peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata juga sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar destinasi pariwisata.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 34.



Sektor Pariwisata adalah salah satu usaha dalam jasa yang meliputi usaha perhotelan, restoran, budaya, objek wisata dan lain-lain, maka pertumbuhan usaha pariwisata juga tidak bisa terlepas dari kunjungan wisatawan. Unsur penting dalam permintaan wisata adalah wisatawan dan penduduk lokal yang menggunakan produk dan jasa wisata.<sup>7</sup>

Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya dan peninggalan sejarah. Hal ini sejalan dengan UU No. 9 Tahun 1990 (Mengenai pariwisata dan peraturan Pelaksanaannya) disebutkan bahwa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan pariwisata.<sup>8</sup>

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem ini memberikan mandat otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.<sup>9</sup> Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk

---

<sup>7</sup> Janianto, Helmut F., *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 3.

<sup>8</sup> Waluyo, Hany, *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: Depdikbud, 1994/1995), h. 9.

<sup>9</sup> UU RI No.32, Op. Cit., h. 22

pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam Al-Quran, pariwisata juga dijelaskan bahwa perjalanan merupakan suatu perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil I'tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta alam semesta ini. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Muhammd Ayat 10 :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

*Artinya: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, Allah telah menimpahkan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. (Q.S. Muhammd: 10)*<sup>10</sup>

Dalam Al-Quran menekankan perlu adanya jaminan keamanan di suatu daerah atau Negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini ditekankan oleh QS. Saba ayat 18 :

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهَرَ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Toha Putra, 2008), h. 129.

*Artinya : “ Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman”.* (Q.S. Saba’: 18)<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa telah diciptakan dunia dengan isinya yang dilimpahi keberkatan, keindahan, sehingga dianjurkan bagi manusia untuk melakukan perjalanan dengan menikmati keindahan dan kenyamanan, keberagaman dengan rasa aman, perjalanan merupakan suatu perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil I’tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta alam semesta ini.

Lampung merupakan salah satu tempat yang menawarkan sektor pariwisata, khususnya Kabupaten Tanggamus. Salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Teluk Kiluan yang terkenal dengan objek wisata yaitu ikan lumba-lumba, keindahan pantai, terumbu karang, *senorkeling* dan *diving*. Jumlah wisatawan yang berkunjung berdasarkan tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang cukup baik. Menurut data Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan 10% setiap tahun dilihat dari

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 430.

jumlah wisatawan tahun 2014 berjumlah 15470 orang, tahun 2015 berjumlah 17017 orang, dan tahun 2016 mencapai 205905 orang.<sup>12</sup>

Pemerintah Daerah diharapkan terus mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tanggamus, khususnya diTeluk Kiluan karena memiliki beragam destinasi wisata yang sangat menjanjikan jika dikelola secara optimal. Dibalik semua keindahan Teluk Kiluan perlu diperjuangkan kelestariannya. Tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas pendukung, seperti belum tersedia alat transportasi umum untuk menuju ke tempat wisata serta akses jalan yang kurang memadai wisatawan untuk berkunjung keTeluk Kiluan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 09 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Tanggamus Bab IV tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.<sup>13</sup> Kemudian dalam masalah pengembangan sektor pariwisata diatur dalam peraturan Bupati Tanggamus No. 34 Tahun 2008 Bab VIII tentang Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang pariwisata yang meliputi sarana prasarana pariwisata, pengembangan. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk membawa nama daerah agar dikenal didunia internasional. Semakin berkualitas pelayanan pariwisata disuatu daerah maka daerah tersebut semakin berkembang dan dikenal.

---

<sup>12</sup> Supriadi, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Tanggamus, Wawancara Pribadi (12 September 2017).

<sup>13</sup> [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_TANGGAMUS\\_9\\_2011.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_TANGGAMUS_9_2011.pdf) (12 Juli 2016).

Seiring dengan perkembangan diberbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya pariwisata juga mempunyai peran penting dalam perkembangannya. Oleh karena itu pariwisata harus dikelola dengan sumber daya manusia yang handal dan profesional dan berkualitas. Saat ini daerah lebih mementingkan pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, tidak kalah penting peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata, sebagai mana digiatkan kembali dalam program sadar wisata, maka keamanan, ketertiban dan kebersihan daerah tujuan wisata tidak saja menjadi beban pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat luas harus juga mampu menarik manfaat positif dari upaya perkembangan pariwisata dengan bertambahnya peningkatan pendapatan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengambil judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan data pengunjung dan surat kabar wisata, teluk kiluan adalah wisata yang banyak diminati wisatawan *domestic* karena keindahan dan ciri khas tersendiri dan teluk kiluan merupakan objek wisata terbaik di Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi fokus bahasan penulis :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus ?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan apasaja yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Kegunaan dari Penelitian :

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan potensi pariwisata di Teluk kiluan Kecamatan Kelumbayan.
- c. Turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sosial politik, terutama untuk jurusan pemikiran politik islam yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata.



## **F. Metode penelitain**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “*field research*” yang dilakukan di tempat wisata Teluk Kiluan Kecamatan kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi dilapangan. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata di Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *PengantarMetodelogiRisetSosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32.

<sup>15</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h.63.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

### a. Observasi

Pengertian dari psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra.<sup>16</sup> Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada karyawan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

### b. Wawancara (*interview*)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dan informan. Dalam hal ini penulis menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, Op. Cit., h. 146.

<sup>17</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 203.

terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.<sup>18</sup> Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Pada prinsipnya sama dengan metode angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>19</sup>

Penulis melakukan wawancara dalam penelitian ini adalah petugas dinas pariwisata Kabupaten Tanggamus bidang pengembangan pariwisata berjumlah 2 orang sebagai responden yang dilaksanakan di kanotor Dinas pada Kamis 05 Janurai 2017 dan aparaturnya sekaligus masyarakat Teluk kiluan 3 orang sebagai informan yang dilaksanakan di kantor pekan kiluan pada Rabu 11 Januari 2017.

### **c. Dokumentasi**

Metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar serta dokumen-dokumen penting

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998),h. 145-146.

<sup>19</sup> Colid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 85.

lainnya.<sup>20</sup> Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>21</sup> Metode ini digunakan sebagai metode bantu untuk menggali data atau dokumen yang berkenaan dengan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata.

### 3. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil secara kesimpulan.<sup>22</sup>

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generelasi-generelasi yang mempunyai sifat umum.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 81.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, Op. Cit., h. 149.

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial jilid ke 14*, (Yogyakarta: UGM Pers, 2015), h. 133.

<sup>23</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 47.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa dengan judul skripsi ini, akan tetapi jika karya ilmiah dengan tema tentang Peran Pemerintah Daerah, pernah penulis temukan, yaitu dengan tema “Peran pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan”. Karya Shinta Dwi damayanti, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Bandar Lampung, 2016. Karya ilmiah tersebut fokus kajian pada permasalahan bagaimana peran pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, serta faktor penghambat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan kota Bandar Lampung.

Kedua, dengan judul “peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Lampung”. Karya Faisal Zulmi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2018. Karya ilmiah tersebut fokus kajian pada permasalahan peranan sektor pariwisata di dalam suatu daerah atau Negara dapat dilihat seberapa besar peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketiga, dengan judul “Peran Humas Dalam Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung (Studi pada Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kesenian Provinsi Lampung)”. Karya Muhamad Imam Syafaat, Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial, Bandar Lampung, 2002. Karya ilmiah tersebut fokus pada kajian bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata di Provinsi Lampung.

Fokus kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan kajian yang penulis tekuni. Penelitian yang penulis tekuni, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.



## **BAB II**

### **PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN PARIWISATA**

#### **A. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintah dan DPR.<sup>1</sup>

Peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang bersifat mengatur dengan menetapkan di dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah, peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retrebusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retrebusi daerah.<sup>2</sup>

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 116.

<sup>2</sup> Ibid, h. 117.

pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain didalam memainkan peran masing-masing.

### **1. Tugas Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah selain menjaga keamanan dan ketertiban tapi juga memberikan pelayanan-pelayanan untuk mengimbangi perkembangan tuntutan-tuntutan pelayanan dari masyarakat saat ini. Prof. Davey mengelompokan fungsi Pemerintah daerah yaitu:<sup>3</sup>

- a. Pemberian pelayanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakat.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

---

<sup>3</sup> Tjahya Supriatna, *Sistem Adminitrasi Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 30.

- d. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e. Fungsi koordinasi dan perencanaan, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

## **2. Fungsi Pemerintah Daerah**

Fungsi pemerintah dalam mengembangkan kegiatan pariwisata diperlukan suatu organisasi yang efektif di daerah, organisasi pariwisata yang berguna untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan, meningkatkan daerah sehingga pariwisata diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai objek unggulan, kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat.

Organisasi yang telah diberikan wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat menjalankan kebijakan organisasi pariwisata pada umumnya adalah:<sup>4</sup>

- a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimiliki.
- b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jabatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industry pariwisata.

---

<sup>4</sup> <http://Fungsidan tugasorganisasipariwisata.blogspot.com/2015/12/1> (diakses pada tanggal 9 juli 2016).

- c. Mensosialisaikan kepada masyarakat pengertian pariwisata, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industry.
- d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran diwaktu-waktu yang akan datang.
- e. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata.
- f. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dimasyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peranan adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dan fungsi pemerintah daerah.<sup>5</sup> Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

## **B. Pengelolaan Pariwisata**

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan menurut Leiper, Pengelolaan merujuk pada seperangkat peran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk pada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu:<sup>6</sup>

- a. Planning (perencanaan)
- b. Directing(Pengarahan)

---

<sup>5</sup> <http://abdipojo.blogspot.co.id/fungsi-dan-peran-pemerintah-daerah.html>. (diakses 7 juli 2016).

<sup>6</sup> Gde pitama, Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 80.

c. Organizing (Termasuk coordinating)

d. Controlling (pengawasan)

Pengelolaan (managemen) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya.

Liang lee juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>7</sup>

## 2. Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta, yang komponen-komponennya terdiri dari kata “*pari*” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, “*wis(man)*” yang berarti rumah, *property*, kampung, komunitas, dan “*ata*” berarti pergi terus menerus, mengembara ( *roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata yang melahirkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap ditempat yang menjadi tujuan perjalanan.

---

<sup>7</sup> Ibid, h, 81.

Dalam keputusan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009, memberikan pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>8</sup>

Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Organisasi pariwisata dunia, mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seorang diluar tempat tinggal dan lingkungan selama tidak lebih dari satu tahun bertujuan untuk berwisata atau bertujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut.<sup>9</sup>

Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 10, Tentang Kepariwisata BAB 1 Pasal 1 Tahun 2009, h.2.

<sup>9</sup> Liga Suryadana, Vanny, *Pengantar pemasaran pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30.



- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata
- g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata
- h. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah suatu bidang industri yang dapat menarik seseorang untuk berkunjung ke suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata karena adanya daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut, serta keseluruhan fenomena alam dan buatan manusia dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan, yaitu memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata.

### **C. Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah**

Organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata. Secara garis besar Peran Dinas Pariwisata adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata yang ada di daerah yaitu objek wisata Teluk Kiluan. Pengelolaan pariwisata tersebut dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan cara memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata (dinamisator).

#### **1. Faktor Penunjang Peran Pemerintah Daerah**

##### **a. Ketersediaan Anggaran**

Pemerintah daerah memerlukan dukungan anggaran dalam menyelenggarakan perannya sebagai pelayanan dan pelindung masyarakat. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Peran strategis anggaran daerah semakin menonjol karena merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran dimasa mendatang,

membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, menetapkan anggaran pengeluaran dimasa mendatang sebagai saran pengembangan ukuran standar untuk evakuasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintah. Maka prinsip pokok yang menekankan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah pada kepentingan publik menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Berkaitan dengan Pemerintah Daerahk ketersediaan anggaran sangat penting, karena anggaran merupakan sektor yang penting bagi pemerintah. Oleh karena itu dalam pengelolaan anggaran penting menerapkan beberapa prinsip terkait dengan *good governance*, antara lain:

Tranparansi, transparansi dalam istilah politik merupakan keterbukaan, yang dimaksud keterbukaan dalam hal ini adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Maksud dari transparansi adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat

Akuntabilitas, dalam istilah akuntabilitas sering diartikan yang dapat dipertanggung jawabkan (*responsilility*), yang dapat dipertanyakan. Dalam peran kepemimpinan akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggung jawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan. Secara teknis adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan

dan melaporkan sesuatu yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Value For Money, Implementasi anggaran yang menerapkan prinsip dapat memberikan manfaat, efektivitas pelayanan publik yang tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan public, penghematan sumber daya, alokasi pembiayaan berorientasi pada kepentingan public dan meningkatkan kesadaran penghargaan terhadap publik. Anggaran diperlukan untuk tersedianya sarana, prasarana dan operasional implementor, untuk mewujudkan realisasi dari kebijakan. Pelaksanaan anggaran keuangan (*financial*) akan ditentukan oleh kualitas implementor dalam pengelolaannya. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan anggaran adalah tersedianya alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat.<sup>10</sup>

#### **b. Ketersediaan sarana dan prasarana**

Kesuksesan dan kelangsungan hidup organisasi dalam menjalankan pengelolaan pariwisata sangat tergantung pada kapasitas dalam merencanakan, menggali, menggerakkan, dan mengelola sumber daya manusia maupun mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan modal pemerintah untuk merealisasikan suatu program. Sarana dan prasarana yang memadai lebih

---

<sup>10</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 160.

memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan. Oleh karena itu pemerintah harus menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah ada, bahkan memperbaharui apabila sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah kepemilikan asset yang menunjang kegiatan untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat.

### **c. Kemitraan**

Prinsip *Good Governance* yang telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan pengusaha swasta merupakan suatu langkah yang biasa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kemitraan membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan kemitraan dalam hal ini adalah kerjasama yang telah atau sedang dilakukan dengan pihak lain yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan terbentuknya pariwisata berbasis masyarakat.

### **d. Landasan Hukum pelaksanaan Pengelolaan Pariwisata**

Penyelenggaraan pemerintah daerah menekan supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah

sesuai dengan pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan landasan hukum pemerintah daerah yaitu pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Undang-undang pasal 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang:

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- 2) Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- 3) Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- 4) Melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- 5) Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
- 6) Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
- 7) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- 8) Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkungan kabupaten/kota.
- 9) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
- 10) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
- 11) Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pemerintah provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban:<sup>12</sup>

- a) Memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitas kepada para pengusaha pariwisata secara optimal.
- b) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata.

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 168.

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 10, Tentang Kepariwisata Pasal 23 Tahun 2009, h.15.



- c) Menyediakan informasi kepariwisataan, memberikan perlindungan hukum, jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan.
- d) Memelihara, mengembangkan dan melestariakan asset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan asset-aset potensial yang belum tergali.
- e) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat.
- f) Memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata.
- g) Menyelenggarakan promosi destinasi dan investasi pengembangan pariwisata.

## **2. Daerah Tujuan Wisata**

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:<sup>13</sup>

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi salah satu cara untuk menarik wisatawan agar tertarik datang ke tempat wisata.

Pengusahaan objek wisata dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam.
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya.
- c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata khusus

Pengelolaan secara profesional dapat menarik wisatawan untuk datang.

Membangun objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu. Daya tarik suatu objek wisata:

---

<sup>13</sup> Gamal Suwanto, *Dasar dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 19-22.

- 1) Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas untuk dapat mengunjungi.
- 3) Adanya ciri khusus yang langka.
- 4) Adanya sarana untuk melayani pengunjung.
- 5) Mempunyai daya tarik yang dominan seperti alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutann.
- 6) Nilai budaya yang tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk ksenian, upacara adat, sejarah.

### **3. Prasarana Wisata**

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan seperti jalan, listrik, air, terminal, jembatan. Untuk menunjang tempat wisata sarana prasana harus dibangun dengan disesuaikan lokasi wisata.<sup>14</sup>

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan daya tarik wisatawan berkunjung, selain prasarana yang dibangun kebutuhan lainya seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat perbelanjaan dan lainya juga perlu dibangun karena wisatawan membutuhkan sarana itu. Pelaksanaan pembangunan diperlukan koordinasi yang sejalan antara instansi terkait agar dapat berjalan sesuai rencana. Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut, seperti

---

<sup>14</sup> Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 20.

untuk meningkatkan informasi, arus ekonomi, arus mobilitas antar daerah, yang tentunya dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja.

Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan selain itu pembangunan sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan bagi wisatawan, keamanan di terminal, diperjalanan akan meningkatkan daya tarik atau objek maupun daerah tujuan wisata. Perlu ada koordinasi antara petugas keamanan baik swasta maupun pemerintah, infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana, sekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

#### **4. Masyarakat dan Lingkungan**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris (*participation*) yang berarti pengambilan keputusan dan pengikut sertaan. Peran serta masyarakat merupakan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah yang mengundang keikutsertaan masyarakat sebagai warga Negara. Dalam rangka mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta masyarakat perlu menjadi sorotan utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 5.

### **a. Masyarakat**

Masyarakat disekitar objek wisata akan menyambut kehadiran wisatawan dan sekaligus akan memberi layanan yang diperlukan oleh para wisatawan, untuk itu masyarakat disekitar objek wisata perlu memahami berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, salah satunya masyarakat sadar wisata. Dengan terbentuknya masyarakat sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari wisatawan.

Peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran serta aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Peran serta pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar tempat wisata. Upaya peningkatan peran serta pasif dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun dialog dengan aparat pemerintah,penyebaran informasi mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam disekitar kawasan obyek wisata yang juga berdampak positif terhadap perekonomian. Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan obyek wisata dapat berbentuk usaha dagang

atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan obyek wisata, antara lain:

- 1) Jasa penginapan atau homestay.
- 2) Penyediaan/usaha warung makanan dan minuman.
- 3) Penyediaan/toko souvenir/cinderamata dari daerah tersebut.
- 4) Jasa pemandu/penunjuk jalan.
- 5) Photography
- 6) Manjadi pegawai perusahaan/pengusahaan wisata, dan lain-lain.

Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa ikut memiliki tempat mata pencaharian yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang terkait dengan pengembangan peran serta masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk menikmati manfaatnya, sehingga perkembangan kegiatan pariwisata ikut membantu kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Lingkungan**

Lingkungan disekitar obek wisata perlu diperhatikan dengan baik agar tidak rusak dan tercemar. Kedatangan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ketahun akan mengakibatkan rusaknya ekosistem disekitar

objek wisata, oleh sebab itu perlu upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui peraturan dan persyaratan dalam pengelolaan objek wisata.

### **c. Budaya**

Budaya yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat harus dijaga kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus meningkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang datang. Masyarakat yang memahami dan menjaga kelestarian objek wisata di daerah menjadi harapan untuk mendorong pengembangan pariwisata yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **D. Berbagai model pengelolaan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah**

### **1. Pemerintah Daerah Tanggamus**

Pemerintah Daerah Tanggamus dalam hal pengelolaan potensi pariwisata tidak secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan tugasnya, tetapi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan wisata dengan konsep Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*). Secara garis besar mengandung pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan atau kemampuan orang atau kelompok lemah terkait akses informasi ke sumber daya, partisipasi atau keterlibatan dalam pembangunan, memegang pertanggung jawaban pihak yang mempengaruhi kehidupan

mereka, dan kemampuan membuat keputusan dengan dukungan lembaga local.<sup>16</sup>

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan kedepan. Pemberdayaan masyarakat yang bermaksud sebagai suatu upaya meningkatkan golongan masyarakat akan sadar dengan wisata, beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan yaitu Pemerintah (fasilitator), Masyarakat (tuan rumah, pelaksana atau subjek pengembangan), Swasta (industry, pengembang, inverstor).

Pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Kepariwisataan tidak terlepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa tradisi dan budaya, yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas.

Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

---

<sup>16</sup> Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata konsep dan Aplikasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 215.

keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuangan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat yaitu:

- a) Mengikut sertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b) Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan, dan Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

## **2. Pemerintah Daerah Lampung Barat**

Pemerintah Daerah Lampung Barat dalam mengelolah pariwisata menggunakan strategi pengembangan pariwisata melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan perekonomian local akan menunjang terhadap terbentuknya pengelolaan pariwisata melalui sapta pesona. Strategi tersebut menjadi penting dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat local dalam pengelolaan pariwisata di Lampung Barat. Selain itu hal ini erat kaitannya dengan kebijakan masyarakat lokal yang sehari-hari berhubungan langsung dengan sumberdaya alam dan lingkungan pariwisata. Dengan adanya upaya pembinaan masyarakat diharapkan akan mampu menyadarkan masyarakat mengenai betapa pentingnya keberadaan sumberdaya manusia hendaknya untuk memenuhi kelemahan pada 4 bidang yaitu: 1) pengelolaan eksploitasi dan produksi sumberdaya alam, 2) pengelolaan pencemaran, 3) pengelolaan bentang alam, rekayasa dan konstruksi, dan 4) pendekatan system dan interdisipliner untuk perencanaan



dan pengelolaan secara terpadu.<sup>17</sup> Adanya strategi tersebut dapat menunjang pengembangan pariwisata melalui sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

### **3. Pemerintah Daerah Tangerang**

Strategi pemerintah daerah tangerang dalam mengelola pariwisata memiliki fokus dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Tangerang diperlukan pandangan dari pihak yang berkepentingan mengenai seperti apa pengembangan pariwisata di kabupaten tangerang. Untuk mencapai tujuan strategi yang matang serta jelas pemerintah daerah tangerang mempunyai empat strategi yang menjadi poros utama, yakni 1) sinergisasi perencanaan pengembangan pariwisata, 2) peningkatan infrastruktur daerah tujuan wisata, 3) pengembangan SDM kepariwisataan dan 4) pemberdayaan masyarakat dan potensi local.<sup>18</sup>

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata di lihat dari beberapa strategi pemerintah daerah di atas, hamper sama dengan strategi pemerintah daerah tanggamus yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan potensi wisata. Pemerintah daerah mempunyai tujuan agar potensi yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat salah satunya yaitu membantu perekonomian masyarakat. fungsi pemerintah daerah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, pemberdayaan masyarakat dan pelayan masyarakat.

---

<sup>17</sup> <http://Tesis.blogspot.co.id/2009/01/Strategi Pengembangan Pariwisata Bidang Sapta Pesona Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.html/> diakses pada (tanggal 22 Juli 2019).

<sup>18</sup> <http://Skripsi.blogspot.co.id/2016/01/Strategi Pengembangan Pariwisata kota Tangerang.html/> diakses pada (tanggal 22 Juli 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Andi Gadjong, Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta : Bina Aksara
- Bagyo, 2007, *Pariwisata dan Perhotelan*, Bandung: Alfabeta,
- Colid Narbuko, Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, 2008, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra.
- Fatoni, Abdurrahmat, 2011, *Metode Penelitan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- I Gede Pitana, I Ketut Surya Dirta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : Andi
- Janianto, Helmut F, 2006, *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta: Andi.
- Kartono, Kartini 1996, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju.
- M. Liga Suryadana, Vanny Octavia, 2015, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Bandung : Alfabeta
- Muslim, Aziz, 2009, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yokyakarta
- Nawawi, Hadari , 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial jilid ke 14*, Yogyakarta: UGM Pers
- Ndaha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Sunaryo, Bambang, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media

Supriatna, Tjahya, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

Suwantoro, Gamal, 2004, *Dasar dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi

Syabani, Fatkhuri, 2016, *Teori Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Tika, Moh Pabundu, 2006, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Waluyo, Hany, 1994/1995, *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*, Jakarta : Depdikbud

<http://www.mikirbae.com/ke-dudukan-dan-peran-pemerintah-daerah.html> diakses pada 4 oktober 2016

[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_TANGGAMUS\\_9\\_2011.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_TANGGAMUS_9_2011.pdf) diakses pada 12 Juli 2016.

<http://Fungsidan tugasorganisasipariwisata.blogspot.com/2015/12/1> diakses pada tanggal 9 juli 2016

<http://abdipojo.blogspot.co.id/fungsi-dan-peran-pemerintah-daerah.html>. diakses 7 juli 2016.

<http://Skripsi.blogspot.co.id/2016/01/Strategi Pengembangan Pariwisata kota Tangerang.html>/ diakses pada tanggal 22 Juli 2019.